

PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN BAGI PENGURUS PIMPINAN CABANG NASYIATUL AISYIYAH CISEENG

Djoni Gunanto¹, Septa Candra², Usni³, Alfani Ramdoni⁴, Chikal Akmalul Fauzi⁵

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia¹²³⁴⁵

Kata Kunci : pendidikan, politik, perempuan, nasyiatul aisyiyah

Correspondensi Author
djoni.gunanto@umj.ac.id

Abstrak : Pendidikan politik adalah sebuah upaya dalam bidang pendidikan yang sudah terencana secara baik dalam rangka meningkatkan tanggung jawab serta moralitas individu dalam mencapai tujuan politik. Untuk itu dalam hal ini pendidikan politik adalah satu upaya untuk memberikan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat berdasarkan pemahaman rakyat tentang demokrasi dimana mereka dituntut untuk dapat menjalankan tugas-tugas partisipasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam sistem politiknya. Pendidikan politik juga didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, dan tujuannya adalah untuk membimbing individu untuk mewujudkan kemampuan orang yang bebas dan kemampuan untuk mengembangkan status warga negara. Pendidikan politik juga dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk penyampaian gagasan politik yang pada akhirnya adalah bermuara kepada tingkat kesadaran politik masyarakat yang meningkat. Pentingnya kesadaran politik akan berimplikasi kepada sadarnya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang mampu berkontribusi kepada proses pembangunan negara. Hasil dari pengabdian ini adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan politik perempuan dan masyarakat menjadi lebih paham tentang pentingnya keterlibatan perempuan di bidang politik.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi digulirkan di Indonesia, partisipasi perempuan di dalam politik, khususnya bagaimana keterwakilan kaum perempuan dalam mengambil keputusan akhirnya menjadi sebuah agenda yang begitu penting. Dengan berbagai terobosan mengenai kebijakan, afirmasi dan penguatan peran perempuan pada politik terus diupayakan hingga saat ini.

Civil society juga dirasa menjadi sebuah hal penting dikarenakan dipercaya bisa untuk dianggap sebagai benteng yang dapat menolak intervensi berlebihan yang mungkin dilakukan negara lewat berbagai macam asosiasi, organisasi maupun pengelompokan bebas yang ada ditengah masyarakat, lalu juga mengenai keberadaan ruang publik yang dianggap bebas. Lewat kelompok mandiri tersebutlah akhirnya rakyat bisa melakukan penguatan terkait posisi mereka ketika berhadapan langsung dengan negara serta dapat dilakukannya berbagai macam transaksi terkait wacana sesamanya.

Menurut Dermawan, Asdep KG Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjelaskan terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi.

Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital.

Musdah Mulia menyatakan bahwa dalam menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif hendaknya agenda perempuan politik dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*), terutama dimulai dari mengubah cara pandang dan pola pikir seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan gender.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Proses pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik, melainkan juga bagi pengurus parpol agar memiliki pengetahuan tentang persoalan politik yang mawadahi. Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat.

Guna menaikkan bargaining position, sangat terkait kepada bagaimana kaum perempuan diberdayakan dalam segala segi kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Demikian halnya pula terkait kepada kesempatan untuk memberikan ruang lebih besar terhadap perempuan, maka untuk itu pengabdian kepada masyarakat ini diajukan sebagai tindak lanjut keberpihakan kepada pemberdayaan kaum Perempuan khususnya bagi pengurus Nasyyatul Aisyiyah Ciseeng.

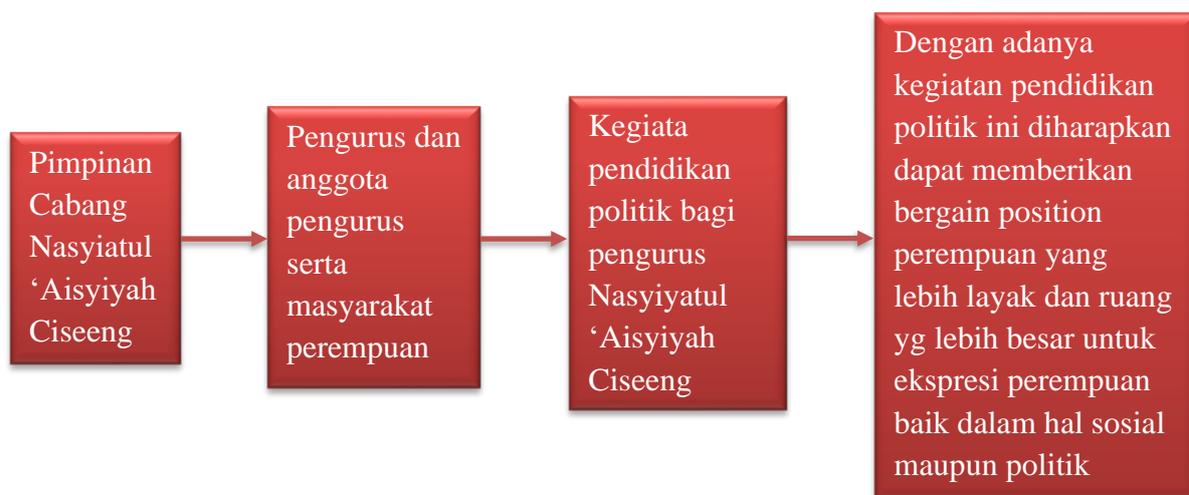
Nasyyatul Aisyiyah (Nasyyah) yang merupakan salah satu organisasi dengan basis perempuan dibawah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kelompok civil society, organisasi ini melaksanakan salah satu tanggung jawab sosialnya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang salah satunya melakukan pendidikan politik khususnya perempuan di internal organisasi serta masyarakat umum.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pendidikan politik perempuan ini dengan beberapa hal bentuk kegiatan:

- Ceramah atau penyuluhan yang sifatnya interaktif mengenai politik bagi perempuan sehingga dapat menaikkan bergain position perempuan .
- Diskusi dan sharing pendapat.

Kerangka kegiatan



Gambar 1: Kerangka pelaksanaan kegiatan pendidikan politik perempuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendidikan politik perempuan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 secara offline. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB dengan peserta sekitar 25 orang yang terdiri pengurus pimpinan cabang Nasyiatu 'Aisyiyah Ciseeng. Dengan demikian diharapkan setelah setelah kegiatan ini berlangsung mengenai pendidikan politik bagi perempuan, peserta dapat menyadari pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik.

Penyuluhan dimulai dengan sambutan dari ketua pimpinan cabang Nasyiatu 'Aisyiyah Ciseeng yang menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan ini, bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam berpolitik sudah saatnya bukan menjadi hal tabu lagi, sudah saatnya para kaum perempuan sadar bahwa kaum perempuan pun berhak terlibat langsung dalam bidang politik.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan kedua yang disampaikan oleh ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Ciseeng, yang selaras dengan sambutan sebelumnya, menyambut baik dengan adanya kegiatan pendidikan politik bagi perempuan, mengingat sebentar lagi menyambut tahun politik, sebagai kaum perempuan harus sadar dan berperan aktif di bidang politik.



Gambar 2: Sambutan Ketua Pimpinan Cabang Nasyyiatul 'Aisyiyah Ciseeng



Gambar 3: Sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciseeng

Sementara itu, acara inti dari kegiatan ini, disampaikan langsung oleh Djoni Gunanto, S.IP., M.Si selaku Dosen ilmu Politik dan juga Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menyampaikan pentingnya keterlibatan perempuan di bidang politik.

Djoni Gunanto menjabarkan pasca reformasi digulirkan di Indonesia, partisipasi perempuan di dalam politik, khususnya bagaimana keterwakilan kaum perempuan dalam mengambil keputusan akhirnya menjadi sebuah agenda yang begitu penting. Dengan berbagai terobosan mengenai kebijakan, afirmasi dan penguatan peran perempuan pada politik terus diupayakan hingga saat ini.

Civil society juga dirasa menjadi sebuah hal penting dikarenakan dipercaya bisa untuk dianggap sebagai benteng yang dapat menolak intervensi berlebihan yang mungkin dilakukan negara lewat berbagai macam asosiasi, organisasi maupun pengelompokan bebas yang ada ditengah masyarakat, lalu juga mengenai keberadaan ruang publik yang dianggap bebas. Lewat kelompok mandiri tersebutlah akhirnya rakyat bisa melakukan penguatan terkait posisi mereka ketika berhadapan langsung dengan negara serta dapat dilakukannya berbagai macam transaksi terkait wacana sesamanya.

Kemudian Djoni Gunanto melanjutkan dalam penjabarannya bahwa menurut Dermawan, Asdep KG Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjelaskan terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi.

Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital.

Musdah Mulia menyatakan bahwa dalam menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif hendaknya agenda perempuan politik dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*), terutama dimulai dari mengubah cara pandang dan pola pikir seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan gender.

Maka dari itu pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga

negara, sehingga bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Proses pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik, melainkan juga bagi pengurus parpol agar memiliki pengetahuan tentang persoalan politik yang mewadahi. Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (political education) bagi rakyat.



Gambar 4 : Djoni Gunanto saat menyampaikan materi

Lebih lanjut lagi, Djoni Gunanto menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan perempuan dalam bidang politik. Pertama, Politisi perempuan bisa merancang atau mendukung undang-undang yang secara langsung mencoba untuk mempromosikan keadilan sosial, pendidikan, maupun ekonomi bagi perempuan. Kedua, politisi perempuan bisa memprioritaskan, dukungan, atau memilih "isu-isu perempuan" – isu kepentingan tertentu dan kepedulian terhadap perempuan. Ketiga, Politisi perempuan juga dapat memprioritaskan, dukungan, atau memilih kebijakan menarik bagi kaum feminis, seperti aborsi atau kontrasepsi. Keempat, Politisi perempuan bisa menyatakan bahwa mereka melihat perempuan sebagai bagian yang tidak berbeda dari konstituen mereka atau bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk memperjuangkan perempuan.



Gambar 5 : Foto bersama peserta pendidikan politik perempuan

Terakhir dalam kesempatannya Djoni Gunanto menyimpulkan bahwa pendidikan politik adalah sebuah upaya dalam bidang pendidikan yang sudah terencana secara baik dalam rangka meningkatkan tanggung jawab serta moralitas individu dalam mencapai tujuan politik. Untuk itu dalam hal ini pendidikan politik adalah satu upaya untuk memberikan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat berdasarkan pemahaman rakyat tentang demokrasi dimana mereka dituntut untuk dapat menjalankan tugas-tugas partisipasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam sistem politiknya.

Pendidikan politik juga didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, dan tujuannya adalah untuk membimbing individu untuk mewujudkan kemampuan orang yang bebas dan kemampuan untuk mengembangkan status warga negara.

Pendidikan politik juga dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk penyampaian gagasan politik yang pada akhirnya adalah bermuara kepada tingkat kesadaran politik masyarakat yang meningkat. Pentingnya kesadaran politik akan berimplikasi kepada sadarnya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang mampu berkontribusi kepada proses pembangunan negara.

Esensi dari pendidikan politik adalah memahami unsur politis dalam setiap persoalan, maka dengan begitu memahami politik berarti memahami konflik. Konflik yang terjadi di masyarakat sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, serta tindakan dalam masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah bagian dari dinamika bermasyarakat. Dalam hal ini politik berperan untuk ikut andil dalam memengerahi pengambilan keputusan di dalam konflik tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar dalam memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat sehingga lebih melek politik dan ikut berpartisipasi dalam setiap proses politik. Melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk ceramah berupa penyampain materi serta diskusi dari para peserta terlihat bahwa peserta dapat berperan aktif dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pendidikan

politik bagi perempuan. Peserta sudah dapat memahami tentang pentingnya partisipasi perempuan di bidang politik, yang pada akhirnya bermuara kepada tingkat kesadaran politik masyarakat yang meningkat. Sudah saatnya perempuan memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulia Musdah Siti, (2005), *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)*, Bandung:PT Mizan Pustaka.
- Qaradhawi Yusuf. (2003), *Qardhawi Berbicara soal Wanita*. Bandung : Arasy.
- Hamka, (2015), *Buya Hamka berbicara tentang wanita*. Jakarta : Gema Insani.
- Jurdi Syarifuddin,(2011) “Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani,” *Jurnal Sulesana Wawasan Keislaman* 6 (2)
- Handoyo Eko dan Lestari Puji, (2017), *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Istikharah dan Asrinaldi, (2019), “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6 (2).
- Agung Iskandar dan Rumtini, (2010), “Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 16 Edisi Khusus III Oktober.
- <https://www.untan.ac.id/pendidikan-politik-berperspektif-gender-sebagai-solusi-meningkatnya-keterpilihan-perempuan-di-parlemen>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- <https://mediaindonesia.com/opini/339396/pendidikan-politik-bagi-perempuan>